KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Biasa Nyontek Kikis Moral Generasi Bangsa
Tanggal : Kamis, 08 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

PKB Soroti Survei KPK

Biasa Nyontek Kikis Moral Generasi Bangsa



FOTO: WEB PKB

Muhammad Hilman

POLITISI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Anggota Komisi X DPR, Muhammad Hilman Mufidi meminta Pemerintah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alarm untuk segera memperbaiki integritas di lingkungan pendidikan.

"Jangan sampai hasil survei hanya berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret," ujar Gus Hilman di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menurut Hilman, temuan masih maraknya kecurangan akademik di sekolah dan perguruan tinggi harus ditindak. Lanjuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan kebijakan yang konkret.

"Kalau menyontek masih terjadi secara luas, kita harus melihatnya sebagai persoalan pendidikan karakter dan budaya integritas. Ini bukan hanya soal siswa, tetapi bagaimana sistem pendidikan membangun lingkungan yang mendorong kejujuran," katanya.

Hilman mendorong pendidikan antikorupsi menjadi bagian integral dari budaya pembelajaran sehari-hari, bukan sekadar materi tambahan yang bersifat hafalan. Dia mengatakan, peningkatan integritas dan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial.

"Harus komprehensif dengan menyusun *road map* dan *grand design* peningkatan integritas siswa serta pencegahan korupsi sejak dini," tegasnya.

Dia juga mendorong Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek memperkuat kemitraan dengan KPK dalam menyusun strategi pembangunan karakter peserta didik. Data dan penelitian yang dimiliki KPK penting sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan pencegahan korupsi akademik secara nasional.

"Pembiaran terhadap kebiasaan menyontek di sekolah maupun perguruan tinggi berpotensi mengikis nilai moral dan tanggung jawab akademik generasi muda," ujarnya.

Dia menegaskan, Komisi X DPR akan terus mengawal integrasi pendidikan karakter dengan sistem evaluasi pembelajaran di kementerian terkait. Menurutnya, kejujuran akademik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berintegritas.

"Pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sekolah maupun kampus. Nilai kejujuran, disiplin, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini demi menyelamatkan generasi mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, KPK meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan (IIP) 2026 sebagai instrumen berbasis data untuk memetakan kondisi integritas pendidikan nasional sekaligus menemukan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Peluncuran IIP 2026 digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Indeks tersebut merupakan hasil kajian dan pengukuran melalui SPI Pendidikan 2026 yang menjangkau 12.810 satuan pendidikan dan melibatkan 393.584 responden dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Noviarsihi, memaparkan responden terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, kepala sekolah, hingga pimpinan perguruan tinggi. ■ BSH